

EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

T. Yuliana Fadillah dan R.M. Amin

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Effectiveness of Governance Village. This study aims to determine the effectiveness and the factors that influence in village governance in the village of Parit I/II and Lalang District Sungai Apit Siak Regency. Research is a quantitative. The population in this study is the apparatus of the village, that village secretary, village staff, RT, RW, and BPD, where the entire population sampled with a sampling technique saturated. The results showed village governance in the category effectively. It can be seen from the construction of the three programs both physical and non-physical as well as sustainability. Then also can be seen from the aspect of service to the community although there is still a slight problem. Factors that influence the effectiveness of village governance is organizational factors, environmental factors, labor factors, and policy factors/management.

Abstrak: Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Parit I/II dan Desa Lalang Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah aparatur desa, yaitu sekretaris desa, staf desa, RT, RW, dan BPD, dimana seluruh populasi dijadikan sampel dengan teknik sampling jenuh. Hasil penelitian menunjukkan penyelenggaraan pemerintahan desa masuk dalam kategori efektif. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan desa yang dilaksanakan baik fisik maupun non fisik serta kesinambungannya. Kemudian juga dapat dilihat dari aspek pelayanan kepada masyarakat walaupun masih ada sedikit masalah. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa adalah faktor organisasi, faktor lingkungan, faktor pekerja, dan faktor kebijakan/manajemen.

Kata Kunci: efektifitas, kebijakan, pelayanan, pemerintahan desa

PENDAHULUAN

Desa memiliki posisi yang sangat strategis, sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu upaya memperkuat desa (pemerintah desa dan lembaga masyarakat) merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah.

Pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan

serta potensi dan keanekaragaman. Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan antara susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi, dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Di samping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan dan penga-

wasan. Di samping itu diberikan pula standar, arahan, bimbingan, pelatihan, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Bersama itu pemerintah wajib memberikan fasilitas yang berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Wijaya (2002), pemerintahan yang efektif adalah pemerintahan yang berhasil menyelenggarakan pemerintahan, yang pada akhirnya bernuansa pada pemberian pelayanan kepada masyarakat yang hakikatnya semakin lama semakin baik. Di samping itu juga untuk memberi peluang peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara luas dalam konteks demokrasi. Berkaitan dengan masalah pemerintahan desa, yakni tentang efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa, adalah sejauhmana pemerintah desa berhasil melaksanakan tugasnya sesuai dengan tujuan pokoknya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kondisi obyektif di lapangan menunjukkan bahwa desa-desa secara umum masih berada pada kondisi tertinggal baik di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dengan sulitnya lapangan kerja. Upaya meningkatkan pembangunan daerah pedesaan di era otonomi daerah sekarang ini merupakan langkah penting dan strategis yang perlu dicermati dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Keberhasilan dalam pelaksanaan tersebut bagaimanapun akan memberikan sumbangan serta andil yang sangat besar, baik dalam rangka upaya pemecahan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh desa dan masyarakat desa sendiri dalam menunjang berhasilnya penyelenggaraan otonomi daerah.

Walaupun tercatat sebagai kecamatan tertua di Kabupaten Siak, Kecamatan Sungai Apit masih bermasalah dengan penyelenggaraan pemerintahan desanya. *Pertama*, kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa dalam rangka meningkatkan PADes seperti membuat kebijakan dalam menggali potensi desa belum dimanfaatkan dengan baik, di mana pemerintah

desa 100% bergantung kepada pemerintah kabupaten dalam pembiayaan. Hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak No. 17 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa, kemudian Peraturan Daerah Kabupaten Siak No. 2 Tahun 2009 tentang Kewenangan Desa, seterusnya Peraturan Daerah Kabupaten Siak No. 3 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan Desa dan juga peraturan tentang APBDes. Hal ini menunjukkan tidak adanya perubahan masalah APBDes.

Kedua, kesiapan pemerintahan desa dalam rangka pelaksanaan administrasi pemerintahan masih belum berjalan dengan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai keluhan warga masyarakat terhadap pemerintah desa, seperti: a) perangkat desa jarang ada di tempat/tidak aktif padahal telah dimotivasi dengan tunjangan atau penghasilan tetap, b) pemerintahan desa tidak transparan, dinilai otoriter dalam pelaksanaan keuangan pemerintahan desa, masyarakat hendaknya disosialisasikan mengenai penggunaan dana dan realisasi keuangan termasuk alokasi dana desa (ADD), dan c) kepala desa kurang berkomunikasi dengan masyarakat dan elemen yang ada di desa.

Ketiga, kesiapan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa yang diberikan pemerintah kabupaten masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari masalah defisit dalam pengelolaan keuangan desa. Kondisi ini membuat pemerintah desa menanggung kekurangan dari dana yang ada. Selain itu juga masalah tidak harmonisnya hubungan antara kepala desa dengan lembaga BPD sehingga menimbulkan banyak kecurigaan yang berlebihan antara kedua belah pihak. BPD menganggap Kepala Desa telah menyalahgunakan wewenang dalam menjalankan pemerintahan desa dan keuangan desa tahun 2009.

Drukker (1964) mendefinisikan, efektivitas sebagai melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right things*), sedang efisiensi sebagai melakukan pekerjaan dengan benar (*doing things right*). Dari kedua pengertian yang dikemukakan Drukker tersebut, maka jelaslah perbedaan antara efektivitas dengan efisiensi. Lockwood (1994) memberikan pengertian ana-

lisis efektivitas, yaitu analisis mutu *output* dari suatu pelatihan standar. Winardi (2003) menempatkan efektivitas keorganisasian sebagai alat ukur kualitas hubungan sebuah organisasi dengan lingkungannya. Sementara Steer (1985) menjelaskan, bahwa batu uji yang sebenarnya untuk manajemen yang baik adalah kemampuan mengorganisasikan dan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia dalam tugas untuk mencapai dan memelihara suatu tingkat operasi yang efektif.

Suatu organisasi yang berhasil dapat diukur dengan melihat pada sejauhmana organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Konsep efektivitas yang dikemukakan oleh para ahli organisasi dan manajemen memiliki makna yang berbeda, tergantung pada kerangka acuan yang dipergunakan. Secara nyata Stoner (1982) menekankan pentingnya efektivitas organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi.

Selanjutnya dikatakan Pualos dan Tannebaum dalam Etzioni (1969) bahwa: "*Organization effectiveness as the extent to which an organization as a social system, given certain resources and mean, fulfil it's objective without incapacitating it's means and resours and without placing stain upon it's member*". (Pandangan tersebut dapat diartikan bahwa efektivitas organisasi adalah tingkat sejauhmana suatu organisasi yang merupakan sistem sosial dengan segala sumber daya dan sarana tertentu yang tersedia memenuhi tujuan-tujuannya tanpa pemborosan dan menghindari ketegangan yang tidak perlu diantara anggota-anggotanya).

Irmansyah (1987) mengatakan bahwa organisasi adalah suatu sistem kerjasama terdiri dari dua orang atau lebih yang tidak berwujud atau tidak bersifat perseorangan atau sebagian besar mengenai hubungan-hubungan. Thoha (2000) memaknai organisasi sebagai kolektivitas orang-orang yang bekerjasama secara sadar dan sengaja untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pencapaian tujuan efektifitas suatu organisasi sumberdaya manusia dan perilaku manusia muncul sebagai pusat perhatian dan usaha-usaha untuk meningkatkan efektivitas harus selalu mulai dengan meneliti perilaku di tempat kerja.

Efektivitas adalah kunci dari kesuksesan

organisasi, karena itu efektivitas banyak berkaitan dengan pencapaian tujuan. Semakin dekat organisasi ketujuannya, maka semakin efektif organisasi tersebut. Efektivitas sangat menentukan kelangsungan hidup organisasi. Perusahaan atau organisasi harus efektif terlebih dahulu (mengerjakan sesuatu yang benar), baru kemudian berusaha mencapai efisiensi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Parit I/II dan Desa Lalang Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

METODE

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah aparatur Desa Parit I/II dan Desa Lalang, yaitu sekretaris desa, staf desa, RT, RW, dan BPD di mana seluruh populasi dijadikan sampel dengan teknik sampling jenuh. Pengumpulan data dan informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik kualitatif dan kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa Parit I/II dan Desa Lalang diperoleh skor 66.9%. Ini berarti bahwa penyelenggaraan pemerintahan di kedua desa sudah efektif. Dari 57 orang responden 2.8% menyatakan sangat setuju, kemudian 45.3% menyatakan setuju, 35.4% menyatakan netral, 16.5% menyatakan tidak setuju, dan tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan diketahui bahwa dengan nilai signifikansi 0.029 pada tingkat toleransi 0.05, maka dapat dikatakan bahwa faktor organisasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di kedua desa. Nilai pengaruh diperoleh sebesar 0.201. Ini berarti setiap perubahan perbaikan organisasi,

maka semakin efektif pula penyelenggaraan pemerintahan desa.

Ini berarti bahwa semakin siap pemerintahan desa dalam rangka menyelenggarakan roda pemerintahannya yang dilihat dari kejelasan arah organisasi, pembagian kerja dan kerjasama tim dalam bekerja. Itemnya: 1) kejelasan arah, 2) pembagian pekerjaan, 2) kerjasama tim. Maka semakin efektif penyelenggaraannya.

Aparat desa dalam pemerintahan desa saling menunggu perintah, sedangkan kepala desa kurang memberikan perintah kepada aparatnya dalam bekerja. Selain itu juga masalah pembagian tugas yang kurang efektif, dimana pekerjaan pada pemerintahan desa pada umumnya diselesaikan sekretaris desa dan juga untuk BPD memang masih sangat kurang bekerja. Hal ini karena masing-masing anggota BPD mempunyai kesibukan sendiri, sedangkan bekerja sebagai wakil masyarakat desa di BPD merupakan pekerjaan sampingan yang tidak menjadi prioritasnya. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa faktor organisasi yang kurang jelas pembagian tugasnya sangat menentukan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan diketahui bahwa dengan nilai signifikansi 0.016. Ini berarti bahwa pada tingkat toleransi 0.05, maka dapat dikatakan bahwa faktor lingkungan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Nilai pengaruh diperoleh sebesar 0.230. Ini berarti setiap perubahan perbaikan lingkungan kerja maka semakin efektif pula penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dapat dijelaskan bahwa semakin baik kondisi lingkungan di mana pemerintahan desa dijalankan dengan memperhatikan pihak-pihak yang mendapatkan pelayanan seperti hubungan kerja, suasana kenyamanan, dan hubungan dengan masyarakat, maka akan semakin efektif penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut. Masyarakat meminta pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahannya perlu mempertimbangkan masyarakat yang diperintah. Hal ini karena masyarakat yang diperintah akan menurut apa yang diperintahkan pada saat pemerintah

mengerti kebutuhan masyarakat desa. Masyarakat sering merasakan bahwa pemerintahan desa yang ada masih kurang mendapatkan dukungan dari masyarakat desa secara luas. Hal ini karena pemerintah desa masih belum berjalan sebagaimana mestinya dan hal ini dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat desa. Hal ini juga dapat diketahui jawaban warga masyarakat bahwa dengan adanya pemerintahan desa mengerti atau memahami akan kebutuhan masyarakat desa yang dipimpin, niscaya pemerintahan desa akan berjalan dengan efektif dengan mendapatkan dukungan dari masyarakat desa.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan diketahui bahwa dengan nilai signifikansi 0.000 pada tingkat toleransi 0.05, maka dapat dikatakan bahwa faktor pekerja memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Nilai pengaruh diperoleh sebesar 0.336 yang berarti setiap perubahan perbaikan pekerja, maka semakin efektif pula penyelenggaraan pemerintahan desa.

Anggota BPD menyebutkan aparat desa masih dinilai ada yang kurang mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pekerjaan yang tidak dikerjakan dan bahkan terbengkalai. Aparat desa kadang masuk kantor pada saat-saat tertentu saja.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan diketahui bahwa dengan nilai signifikansi 0.043 pada tingkat toleransi 0.05, maka dapat dikatakan bahwa faktor kebijakan/manajemen memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Nilai pengaruh diperoleh sebesar 0.201 yang berarti setiap perubahan perbaikan kebijakan/manajemen maka semakin efektif pula penyelenggaraan pemerintahan desa.

Seorang aparat desa jarang sekali mendapatkan kesempatan untuk mengusulkan ide atau saran kepada kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Kemudian juga dapat diketahui aparat desa cenderung takut dengan kepala desa sehingga apa saja keputusan yang diambil oleh kepala desa tidak menda-

patkan sanggahan atau masukan. Hal ini juga menyebabkan pekerjaan terkadang tidak dikerjakan oleh aparat desa dalam bekerja.

Diketahui faktor lain yang mempengaruhi efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Parit I/II dan Desa Lalang adalah masalah pendidikan. Aparat desa yang cenderung memiliki tingkat pendidikan SD dan SMP menjadi masalah tersendiri dalam mengetahui system dan administrasi pemerintahan desa. Kondisi ini sangat tergantung dari rata-rata pendidikan masyarakat di sekitarnya.

Penyelenggaraan pemerintahan desa masuk dalam kategori efektif. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan desa yang dilaksanakan baik fisik maupun non fisik serta kesinambungannya. Kemudian juga dapat dilihat dari aspek pelayanan kepada masyarakat walaupun masih sedikit ada masalah khususnya pada waktu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Namun masih dinilai kurang mandiri karena dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa masih mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah. Sedangkan desa memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan seperti sektor perkebunan. Terakhir juga masalah daya saing desa masih rendah dan perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Parit I/II dan Lalang antara lain: faktor organisasi, dimana terbukti bahwa kejelasan kepala desa dalam menentukan arah dan mensosialisasikan memberikan dampak kepada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Faktor lingkungan, di mana dengan harmonisnya hubungan pemerintah desa dengan masyarakat memberikan pengaruh pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Faktor pekerja, dukungan pekerja dalam bekerja berupa kekompatan dan kerjasama tim memberikan pengaruh pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Faktor kebijakan/manajemen, dimana semakin baik pengambilan keputusan yang dilakukan kepala desa beserta masyarakat, maka akan berpengaruh kepada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Ternyata juga dapat di-

ketahui faktor dukungan aparat desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa merupakan faktor yang paling dominant dibandingkan dengan faktor lainnya.

SIMPULAN

Penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Parit I/II dan Desa Lalang Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak masuk dalam kategori efektif. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan desa yang dilaksanakan baik fisik maupun non fisik serta kesinambungannya. Kemudian juga dapat dilihat dari aspek pelayanan kepada masyarakat, walaupun masih sedikit ada masalah khususnya pada waktu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Namun masih dinilai kurang mandiri karena dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa masih mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah. Desa memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan seperti sektor perkebunan. Terakhir juga masalah daya saing desa masih rendah dan perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Faktor dukungan aparat desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa merupakan faktor yang paling dominant dibandingkan dengan faktor lainnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Adam, Indrawijaya. 2000. *Perilaku Organisasi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Azhar Kasim. 1993. *Pengukuran Efektifitas dalam Organisasi*. Jakarta: FE UI
- Drukker. 1964. *Managing For Result*. New York: Harper & Row
- Etzioni, Amitai. 1969. *Modern Organization*. New York: Prentice Hall Cliffs
- Gibson, James L., Ivancevich, John M., Donnelly, James H. 1996. *Organisasi Perilaku, Struktur dan Proses*. Jakarta: Binapura Aksara
- Hadari, Nawawi, 2000, *Administrasi Personel*. Jakarta: Gunung Agung
- Irmansyah, Mamat. 1987. *Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Bandung: CV. Armico

- Jones. 1994. *An Introduction to The Study of Public Policy*. California: Brooks/Cole Publishing Company
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rineka Cipta
- Siagian, Sondang. 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sigit, Soehardi. 2003. *Perilaku Organisational*. Yogyakarta: Lukman Offset
- Steers. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Stoner, AF James. 1982. *Manajemen*. Jakarta: Erlangga
- Thoha, Miftah. 2000. *Pembinaan Organisasi*. Jakarta: Arga Kencana Abadi
- Winardi, J. 2003. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada